

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Daerah

Shinta Devianti¹ Nia Auliyah Lubis² M.Alhafis³ Ilsa Fatika⁴ Teuku Muhammad Wahyu⁵

Citra Darminto⁶

Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Jambi

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peranan penting dalam merencanakan, membiayai, dan mengimplementasikan berbagai proyek infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program-program infrastruktur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memainkan peran sentral dalam penyediaan dana, regulasi, dan koordinasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur, tantangan seperti keterbatasan anggaran, hambatan birokrasi, dan ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi isu utama. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk menciptakan pembangunan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pemerintah, pembangunan infrastruktur, kebijakan publik, koordinasi, tantangan pembangunan.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci yang mendukung kemajuan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik dapat mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan aksesibilitas, serta mendukung sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan perhubungan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama

dalam agenda pembangunan nasional, baik di negara maju maupun berkembang, termasuk di Indonesia.¹

Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memegang peranan sentral dalam pembangunan infrastruktur. Sebagai pemangku kebijakan, pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, menyediakan dana, serta mengatur pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, berbagai program pembangunan infrastruktur telah dijalankan, baik yang bersumber dari anggaran negara (APBN) maupun dengan melibatkan kerjasama antara sektor publik dan swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP). Namun, meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur masih terus muncul, seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan pembangunan antar daerah, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta hambatan birokrasi. Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara daerah maju dan tertinggal masih menjadi masalah signifikan, yang mengakibatkan ketidakmerataan akses terhadap pelayanan publik di berbagai wilayah.²

Melihat pentingnya peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai efektivitas kebijakan dan program-program yang telah diterapkan, serta bagaimana meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang lebih merata, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, serta tantangan dan solusi yang dapat diambil untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur ?

¹Janice, A. (2014). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Ilmu Pemerintahan, 3(3).

² Kessa, W. (2015). Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

2. Apa saja tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, baik di tingkat pusat maupun daerah?

PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur di Indonesia melibatkan peran aktif pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek-proyek infrastruktur untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan. Berikut adalah peran pemerintah dalam setiap tahap pembangunan infrastruktur di tiap wilayah; Perencanaan Pembangunan Infrastruktur melalui berbagai lembaga dan kementerian, bertanggung jawab untuk merencanakan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan nasional. Beberapa hal yang menjadi fokus dalam tahap perencanaan ini antara lain:³

Penyusunan Rencana Pembangunan

Perencanaan Pembangunan diselenggarakan desa/kelurahan melalui Badan Permusyawaratan Desa dan unsur Masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa/kelurahan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan. Perencanaan adalah proses membuat rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ini termasuk mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Menganalisis situasi saat ini, dan mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pemerintah Kelurahan menyusun perencanaan Pembangunan Kelurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

- Pemetaan Kebutuhan Infrastruktur:

Pemerintah melakukan analisis untuk memetakan kebutuhan infrastruktur berdasarkan pertumbuhan populasi, distribusi wilayah, dan sektor-sektor ekonomi yang berkembang di daerah. Perencanaan ini juga mempertimbangkan potensi daerah, serta kesenjangan infrastruktur antar wilayah.

³ Rohman, S. (2017). Koordinasi Camat dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Pemerintahan

- Alokasi Anggaran: Pemerintah juga merencanakan pembiayaan infrastruktur, baik melalui sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam dana daerah maupun melibatkan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP).

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

Pelaksanaan proyek infrastruktur melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kontraktor, dan sektor swasta. Dalam tahap ini, pemerintah berperan dalam berbagai hal berikut:⁴

- **Penyediaan Dana**
Pemerintah menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, baik melalui APBN, APBD, maupun melalui kerja sama dengan sektor swasta. Program-program infrastruktur besar sering kali didanai dengan dana yang bersumber dari APBN, sedangkan untuk proyek-proyek lokal dapat dibiayai oleh APBD.
- **Penyusunan Regulasi dan Standar**
Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyusun regulasi, standar, dan prosedur yang harus dipatuhi dalam pembangunan infrastruktur. Regulasi ini mencakup kualitas teknis, lingkungan, dan sosial yang harus dipenuhi oleh proyek-proyek infrastruktur.
- **Partisipasi Masyarakat**
Dalam beberapa proyek, pemerintah juga melibatkan masyarakat setempat untuk memberikan masukan terkait kebutuhan dan prioritas infrastruktur, serta memastikan bahwa pembangunan tidak merugikan kepentingan lokal.
- **Pengawasan Internal dan Eksternal**
Pengawasan dilakukan baik oleh instansi internal pemerintah, seperti Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun eksternal melalui lembaga audit seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dan efisien serta mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari proyek infrastruktur.

⁴ Maksimilianus Ardiyanto, dkk., Perencanaan dan Pengembangan Desa, Dream Litera, Malang, 2020.

2. Tantangan yang Dihadapi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Pembangunan infrastruktur di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik di tingkat pusat maupun daerah. Beberapa tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur antara lain, Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Meskipun alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur terus meningkat, namun anggaran tersebut masih sering kali dianggap tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur yang ada, terutama di daerah-daerah tertinggal. Pemerintah harus pandai dalam mengelola anggaran yang terbatas serta memprioritaskan proyek-proyek yang paling mendesak dan berdampak besar terhadap perekonomian.⁵

Kemudian, Pembangunan infrastruktur di Indonesia sering kali terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, seperti Pulau Jawa, sementara wilayah lainnya, terutama daerah terluar dan tertinggal, masih kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Ketimpangan ini menyebabkan akses terhadap infrastruktur yang memadai tidak merata, sehingga memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi antara daerah maju dan daerah tertinggal. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja keras untuk mengurangi ketimpangan ini, meskipun hal ini memerlukan alokasi anggaran yang lebih besar dan perencanaan yang lebih inklusif.

Selain hal diatas, Proses perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek infrastruktur sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit. Peraturan yang tumpang tindih, proses pengadaan yang lama, serta kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah dapat memperlambat realisasi proyek. Di tingkat daerah, hal ini sering kali diperburuk oleh keterbatasan kapasitas administrasi dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola proyek-proyek besar.⁶

Terakhir, Masyarakat yang terkena dampak pembangunan infrastruktur kadang-kadang menolak proyek-proyek tertentu karena alasan sosial, budaya, atau ekonomi. Penggusuran, perubahan pola hidup, atau dampak lingkungan dapat menimbulkan perlawanan yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan

⁵ Suharsono Edy, Teori Peran konsep, derivasi, dan implikasinya, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2016

⁶ Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013

yang lebih inklusif dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek untuk mengurangi resistensi dan memastikan keberlanjutan proyek.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat krusial untuk menjamin keberhasilan pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, dan pengawasan yang ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Dalam pelaksanaannya tentunya masih terdapat berbagai tantangan yang melingkupi proses pembangunan infrastruktur, dimana tantangan tersebut membutuhkan perhatian serius dari pemerintah di semua level, baik pusat maupun daerah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Selain itu, inovasi dalam pembiayaan, perencanaan yang lebih baik, peningkatan kapasitas SDM, serta peningkatan partisipasi masyarakat dan pengelolaan dampak lingkungan harus menjadi bagian dari strategi pembangunan infrastruktur yang lebih efektif dan berkelanjutan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka peneliti memberikan pandangan berupa suatu masukan bahwa dalam pembangunan infrastruktur daerah peran pemerintah sangat berpengaruh apabila diikuti pula dengan meningkatkan Peran pemerintah sebagai regulator yaitu dengan membuat peraturan desa mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah sehingga lebih terarah dan ada panduan khusus dalam menjalankan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Janice. (2014). Studi Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dalam Pembangunan Desa di Desa Tanjung Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. Ilmu Pemerintahan,.
- Kessa, W. (2015). Perencanaan Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Maksimilianus Ardiyanto, d. (2020). Perencanaan dan Pengembangan Desa, Dream Litera, Malang, .
- Rohman, S. (2017). Koordinasi Camat dengan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Pemerintahan.
- Soekanto Soerjono. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suharsono Edy. (2016). *Teori Peran konsep, derivasi, dan implikasinya*,. Jakarta, : PT Gramedia Pustaka Utama,.